

PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

(Tinjauan Historis, Sosiologis, Politis, Ekonomi dan Manajemen Negara)

Husin

Dosen, STIQ Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia

hafzihusinsungkar@gmail.com

ABSTRACT

The curriculum in its journey always developing and changes according to the development of science. Not only that, political, economic, social and cultural factors also become a matter of concern in curriculum change. Islamic educational institutions such as Madrasah in the implementation of education must always evolve in accordance with the conditions of curriculum development that exists. But as an educational institution whose main purpose is to shape the character of learners who are not only able to answer the needs of society, Islamic education institutions must also be able to answer the needs of the market. Moreover, Indonesia has entered the AEC (ASEAN Economic Community) which allows the free market among ASEAN countries so that Islamic education institutions must also grow up so as not to be left behind with other countries.

Keywords : Curriculum, Job Vacancy, Social Needs.

Pendahuluan

Kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perjalanannya telah melakukan berbagai perkembangan mulai dari sentralisasi, desentralisasi serta otonomi terhadap pendidikan dan selalu mengalami inovasi setiap tahunnya. Perkembangan kurikulum tidak terlepas dari usaha pemerintah, pelaksana pendidikan dan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi rendahnya kualitas proses dan rata-rata kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam konteks persaingan regional dan global.¹

Kajian Teori

1. Pengertian Kurikulum

Syaifuddin Sabda² dalam buku beliau yang berjudul Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis, memberikan tiga sudut pandang terhadap pengertian kurikulum

¹Asfiati, *Pendekatan Humanis dalam Pengembangan Kurikulum* (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 24.

²Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan) adalah seorang pakar di bidang pendidikan Islam dan pengajar Indonesia. Ia merupakan guru besar dan Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Husin
PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN..

yang terdiri atas sudut pandang etimologis, terminologis tradisional, dan terminologis modern.³

Dari sudut pandang etimologis, istilah kurikulum dinyatakan berasal dari bahasa latin yakni *currere* atau *corro* yang berarti *run, hurry, hasten, speed, move, travel, processed, dan of a race*. Selanjutnya istilah tersebut diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang melahirkan istilah "*course*", "*racecourse*", atau "*racetrack*". Istilah "*course*" berarti "*a direction or route taken or to be taken*". Mengambil makna dari kamus Webster, Syaifuddin Sabda memberikan makna kurikulum secara etimologi berarti lapangan pacuan kuda, jarak tempuh untuk lomba lari, perlombaan, pacuan balapan, peredaran, gerak berkeliling, lapangan perlombaan, gelanggang, kereta balap, dan lain-lain.⁴ Pemakaian istilah yang semula dipakai dalam dunia olah raga tersebut sepertinya didasarkan pada persesuaian makna atau hakikat yang dikandung oleh istilah tersebut, baik yang dipakai dalam dunia olah raga dan yang dilakukan dalam dunia pendidikan yaitu adanya tempat dan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang didalamnya terdapat proses yang harus dilalui mulai dari garis *start* sampai *finish* atau tujuan.

Muzaiyyin Arifin berpendapat bahwa kata kurikulum berasal dari bahasa latin *a little racecourse* (suatu jarak yang ditempuh dalam pertandingan olah raga) yang kemudian dialihkan dalam pengertian pendidikan menjadi *circle of instruction* yaitu suatu lingkaran pengajaran, di mana guru dan murid terlibat di dalamnya.⁵

S. Nasution berpendapat bahwa kata kurikulum berasal dari bahasa latin *curriculum* yang berarti bahan pengajaran.⁶ Sedangkan kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menerjemahkan kata kurikulum sebagai perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan, atau perangkat mata kuliah bidang khusus.⁷ Oemar Hamalik menyatakan bahwa kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa.⁸

Kurikulum dalam bahasa Arab diartikan dengan *manhaj*,⁹ yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam

³Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 21.

⁴Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum ..*, h. 21-22. Lihat juga Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 13.

⁵Muzaiyyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 78.

⁶S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, cet. Ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 1.

⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 802.

⁸Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 65. Bahkan Alice Miel memahami bahwa kurikulum meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, kecakapan, dan sikap-sikap orang yang melayani dan dilayani di sekolah (termasuk didalamnya seluruh pegawai sekolah) dalam memberikan bantuan kepada siswa termasuk ke dalam kurikulum. Lihat Alie Miel, *Changing The Curriculum a school Proses* (New York: D Appleton Century Company, 1946), h. 10. Lihat juga Romine St, *Building The High School Curriculum* (New York: The Ronald Press Company, 1954), h. 14. Hasbullah juga menjelaskan bahwa fasilitas adalah juga bagian dari kurikulum. Lihat Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 21.

⁹A. WarsonMunawwir, *KamusAl-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 1(Surabaya: PustakaProgresif, 1984), h. 1567, menerjemahkan kata *manhaj*denganrencanapengajaran. Mengutip terjemahkan dari Al-Munawwir, Syaifuddin Sabda dalam bukunya memunculkan istilah *Minhaj al ta'lim* yang berarti rencana pengajaran atau kurikulum pembelajaran. Dalam bentuk lain dikenal pula istilah

konteks pendidikan, kurikulum berarti berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap serta nilai-nilai.¹⁰ Muhaimin menjelaskan (dikutip dari pernyataan Al-Khauly) bahwa *al-Manhaj* sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.¹¹

Dalam terminologis tradisional kurikulum hanya diartikan hanya sebatas apa yang menjadi isi pendidikan atau pembelajaran yang harus dikuasai dan diberikan dalam proses pendidikan, khususnya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dengan demikian, pengertian tradisional ini disebut juga pengertian kurikulum dalam pengertian yang sempit.¹² Dinyatakan sebagai kurikulum dalam pandangan sempit seperti yang dikatakan oleh Crow and Crow bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan harus diselesaikan dalam sebuah jenjang pendidikan selain itu kurikulum dipandang terbatas pada materi atau bahan yang diberikan dan harus dikuasai oleh peserta didik dalam sebuah kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang diberikan secara formal di sekolah atau kelas.¹³ Sedangkan disebut sebagai pengertian tradisional dikarenakan kurikulum dalam arti sempit ini umumnya dianut atau dipakai pada konsep dan praktik pendidikan masa lalu.¹⁴

Terminologis modern atau definisi kurikulum kontemporer yang salah satunya diwakili oleh Syaifuddin Sabda dalam bukunya menjelaskan bahwa kurikulum dalam pandangan modern tidak hanya sebatas isi atau mata/materi pelajaran yang harus dikuasai siswa, tetapi juga memuat hal-hal lain yang dipandang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan pendidikan atau pembentukan siswa sesuai dengan yang diinginkan.¹⁵

Ahmad Tafsir juga menjelaskan makna kurikulum secara luas tidak hanya sekedar berisi rencana pelajaran atau bidang studi, melainkan semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah.¹⁶ Sedangkan Hasan Langgulung mendefinisikan Kurikulum secara terminologis modern sebagai sejumlah pengalaman

Minhaj al-dirasi atau kurikulum mata pelajaran atau *Minhaj al Madrasah* (Kurikulum Sekolah/Madrasah). Lihat Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum...*, h. 23. Syamsul Bahri dalam jurnalnya mengutip pernyataan dari Saylor dan Alexander menjelaskan " ...school's curriculum is the total effort of the school to bring about desired outcome's in school and in out of school situation. In short, the curriculum is the school's program for learner" yang berarti bahwa " ...kurikulum sekolah adalah upaya total sekolah untuk membawa hasil yang diinginkan di sekolah dan di luar situasi sekolah. Singkatnya, kurikulum adalah program sekolah untuk pelajar". Syamsul Bahri, "Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya" *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vo. XI, no. 1 (2011): h. 18. Bandingkan dengan Saylor, and Alexander, *Curriculum Planing for Better Teaching and Learning* (New York: Holt: Rinehart, 1960), h. 4.

¹⁰Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 478.

¹¹Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), h. 1.

¹²Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2016), h. 122.

¹³Crow and Crow, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, terj. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), h. 75.

Pengertian lama tentang kurikulum lebih menekankan pada isi pelajaran atau mata kuliah, dalam arti sejumlah mata pelajaran atau mata kuliah di sekolah atau perguruan tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat; juga keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Lihat Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum ...*, h. 2.

¹⁴Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum ...*, h. 24.

¹⁵Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum ...*, h. 25.

¹⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 53.

pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian, baik yang berada di dalam maupun luar kelas yang dikelola oleh sekolah.¹⁷

Menurut Syaifuddin Sabda, pergeseran dan perluasan makna kurikulum sejalan dengan perkembangan filosofis, teori dan konsep pendidikan dan kurikulum yang terus mengalami perkembangan dan pergeseran makna dari hanya sebagai isi (konten) pendidikan atau pembelajaran ke pengertian sebagai sebuah proses, dan pergeseran dari pengertian sempit ke konsep kurikulum dalam makna yang luas.

Dari berbagai makna kata kurikulum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa ahli yang menekankan kata kurikulum kepada isi pembelajaran atau mata pelajaran, dan di lain pihak lebih menekankan pada proses atau pengalaman belajar.

2. Perkembangan dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia

Dari beberapa definisi kurikulum yang telah dikemukakan sebelumnya, Mohammad Sya'roni Hasan mendefinisikan pengembangan kurikulum sebagai perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum yang lain.

Kurikulum memiliki posisi strategiskarena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Karena sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan, kurikulum mutlak harus fleksibel dan futuristik. Ketimpangan-ketimpangan dalam disain kurikulum karena kurang respon terhadap perubahan sosial boleh jadi berkonsekuensi kepada lahirnya *output* pendidikan yang 'gagap' dalam beradaptasi dengan kondisi sosial yang dimaksud.

Atas dasar pertimbangan ini, maka pengembangan kurikulum menjadi salah satu tugas pokok pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan. Demikian juga halnya dengan peran tokoh maupun pemerhati pendidikan agar mengikuti setiap episode dari perubahan sosial, karena semua itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendisain serta mengembangkan kurikulum. Selain itu, partisipasi masyarakat aktif juga sangat diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merespon setiap perubahan.¹⁸

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dikembangkan bertolak pada keperluan dan minat peserta didik yang mendorong peserta didik mengaktualisasikan alat-alat potensial dan potensi-potensi dasar serta mendorongnya untuk mampu mengemban amanah baik sebagai *'abdullah* maupun *khalifatullah*.¹⁹

Pengertian kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum, perbedaan hanya terletak pada sumber pelajarannya saja. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid dalam bukunya Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetensi, mengatakan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam.²⁰

¹⁷Hasan Langgung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), 483-484.

¹⁸Syamsul Bahri, "Pengembangan Kurikulum...", h. 15-16.

¹⁹Asfiati, *Pendekatan Humanis ...*, h. 3.

²⁰Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 74.

Analisis

1. Tinjauan Secara Historis

Kurikulum dalam pendidikan Islam telah ada sejak periode awal pendidikan Islam, yaitu pada masa hidup Rasulullah SAW. Salamah menukil dari pernyataan Ashraf memaparkan bahwa mata pelajaran yang juga merupakan isi kurikulum pada masa itu berupa : Alquran, Al-Hadits, Tata Bahasa, Retorika, dan prinsip-prinsip hukum. Salabi menambahkan dengan mata pelajaran membaca, menulis dan syair Arab.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan Islam, khususnya ketika pendidikan Islam dilaksanakan dalam bentuk lembaga pendidikan formal, isi kurikulum pendidikan Islam mengalami perkembangan. Pada masa kemajuan peradaban Islam, khususnya pada masa pemerintahan al-Ma'mun (813-833 M), lembaga-lembaga pendidikan Islam telah memiliki kurikulum yang memuat sejumlah ilmu pengetahuan.²¹ Menurut Nakosteen²² mata atau materi pelajaran pada lembaga pendidikan Islam pada masa itu berupa : Matematika (Al-Jabar, Trigonometri dan Geometri); Sains (Kimia, Fisika dan Astronomi); Ilmu Kedokteran (Anatomi, Pembedahan, Farmasi dan cabang-cabang Ilmu Kedokteran Khusus); Filsafat (Logika, Etika dan Metafisika); Kesusastraan (Filologi, Tata Bahasa, Puisi dan Ilmu Persajakan); Ilmu-ilmu Sosial (Sejarah, Geografi, disiplin-disiplin yang berhubungan dengan Politik, Hukum, Sosiologi, Psikologi dan Jurisprudensi (Fiqih); Teologi (Perbandingan Agama, Sejarah Agama, Studi Alquran, Tradisi Religius (Hadits) dan topik-topik religius lainnya.²³

Mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak periode awal pendidikan Islam hingga masa kejayaannya (masa klasik) dipandang sebagai satu kesatuan, dalam arti tidak ada pemisahan antara pengetahuan umum dan agama. Meskipun ada pengklasifikasian atau pemilahan ilmu, seperti ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu pengetahuan umum seperti yang dilakukan oleh al-Farabi dan al-Ghazali dan para filosof lainnya, namun mereka tetap menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan itu merupakan bagian dari khazanah ilmu pengetahuan Islam. Semua ilmu tersebut dipandang sama-sama berpangkal dari Allah SWT, baik yang didapat langsung dari firman-Nya maupun yang didapat melalui pemikiran dan pengolahan manusia atas dasar ciptaan-Nya di alam ini.²⁴

Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) di Indonesia mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut:

1. Perubahan dari tekanan hafalan dan daya ingatan tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah, kepada pemahaman tujuan, makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI.

²¹Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum ...*, h. 41.

²²Guru besar dalam bidang sejarah dan filsafat pendidikan di University of Colorado.

²³Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum ...*,h, 5-6.

²⁴Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum ...*, h. 42.

2. Perubahan dari cara berfikir tekstual, normatif dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran dan nilai-nilai agama Islam.
3. Perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut.
4. Perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum PAI ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan PAI dan cara-cara mencapainya.²⁵

Terkait dengan perubahan kurikulum Pendidikan Agama Islam, jika dibandingkan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum madrasah tahun 2013, maka akan kita dapati sebuah perbedaan pada mata pelajaran Bahasa Arab yang tidak lagi masuk dalam wilayah Pendidikan Agama Islam, akan tetapi sudah disejajarkan dengan mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan lain-lain.

2. Tinjauan Secara Sosiologis

Landasan sosiologis atau sosial budaya dalam pengembangan kurikulum berkenaan dengan adat istiadat, keyakinan, nilai, bahasa, agama, dan lembaga-lembaga sosial yang turut berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Sekolah berada dalam konteks sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dan kurikulum memiliki hubungan yang erat dengan keadaan sosial dan budaya di mana sekolah itu berada. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum menggambarkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor sosial-budaya merupakan salah satu landasan pengembangan kurikulum.²⁶

Seringkali muncul perdebatan ketika merespon pertanyaan, yang manakah mempengaruhi, apakah perubahan masyarakat mempengaruhi perubahan pendidikan? atau sebaliknya, perubahan pendidikanlah yang mempengaruhi perubahan masyarakat? Jawaban paling bijak adalah antara perubahan pendidikan dengan perubahan masyarakat sifatnya komplementer atau saling melengkapi. Artinya, dinamika pendidikan saling terkait dengan dinamika masyarakat, terlebih dengan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam tumbuh kembangnya masyarakat terdapat unsur nilai-nilai budaya, bahasa, serta ragam perilaku sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat melainkan

²⁵Muhammad Irsad, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah", *Jurnal Iqra* Vol. 2, no. 1 (2016): h. 248.

²⁶Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum ...*, h. 202. Peraturan Menteri Agama RI No. 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab BAB 1 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa kerangka dasar kurikulum Madrasah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum. Musawir dalam tesisnya menyebutkan bahwa tinjauan pendekatan sosiologis dalam pengembangan dan perubahan kurikulum karena berpandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Lihat Musawir, "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Tiattang Kabupaten Bone" (Tesis tidak diterbitkan, UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 109.

juga tanggung jawab lembaga pendidikan dimana lembaga pendidikan merupakan wadah yang terorganisir dan efektif untuk melanggengkan unsur-unsur tersebut.²⁷

Salamah menyatakan bahwa secara sosiologis pendidikan agama Islam pada madrasah beraliran tradisional, di mana fungsi pendidikan adalah mewariskan budaya masa lalu ke generasi berikutnya. Dalam sosiologi pendidikan Islam memandang tugas sekolah tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan perubahan sosial, dan juga untuk kepentingan kesadaran akan keberadaan Allah SWT sebagai tujuannya.²⁸

Kurikulum dapat juga dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. dapat dimaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.

Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan.

Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia -manusia yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem-sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik atau segi-segi kehidupan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat. Melalui pendidikan, manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespons dan berlandaskan pada perkembangan sosial - budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global.²⁹

Dengan dijadikannya sosiologis sebagai asas atau landasan dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum, maka peserta didik nantinya diharapkan mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁰

²⁷Kaimuddin, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi", Jurnal Al-Ta'dib Vol. 8, no. 1 (2015): h. 15.

²⁸Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum ...*, h. 77.

²⁹Moch. Sya'roni Hasan, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terpadu di Sekolah", Al-Ibrah Vol. 2, no. 1 (2017): h. 70.

³⁰Didiyanto, "Paradigma Pengembangan Kurikulum PAI di Lembaga Pendidikan" Jurnal Pendidikan Agama Islam Edureligia Vol. 1, no. 2 (2017): h. 129.

3. Tinjauan Secara Politis

Binti Maunah menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, karena setiap kali tampuk pimpinan sebuah Negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan berubah.³¹ Walaupun sebenarnya menurut penulis bahwa faktor politik hanya sebagian kecil saja dari landasan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia.

Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah, dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pengembangan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan.

Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, maka kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibentuk oleh kolonial Belanda diganti dengan model pendidikan berciri khas Jepang. Kebijakan kolonial Jepang adalah pada pendidikan tingkat rendah, Jepang menggantinya dengan sebutan *Kokumin Gako* dengan lama pendidikan 6 tahun. Kebijakan kurikulum pendidikannya lebih menitik beratkan pada olahraga kemiliteran yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang.³²

Kebijakan kurikulum pendidikan pada masa pasca kemerdekaan, dibatasi sampai pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Reformasi membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini diawali dengan terbitnya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 beserta turunan perundang-udangannya. Kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994.

Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013. Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan Ilmu pengetahuan dan teknologi.³³

4. Tinjauan Secara Ekonomi

Beberapa tahun belakangan, iklan di televisi gencar mensosialisasikan terkait dengan ASEAN Economic Community atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat

³¹Binti Maunah, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 53.

³²Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2007), h. 17.

³³Imam Machali, "Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1111, no. 1 (2014): h. 7-10.

Ekonomi ASEAN (MEA). Iklan tersebut mempunyai misi untuk mengedukasi masyarakat agar mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas ASEAN, sehingga para pengusaha kecil dan menengah sudah harus mempersiapkan diri menghadapinya agar tidak kalah bersaing dengan produk maupun jasa yang ditawarkan dari luar.

Namun, terlepas dari semangat untuk memperkuat perekonomian antar Negara ASEAN, lembaga-lembaga pendidikan Islam pada akhirnya harus mempersiapkan diri dengan merumuskan langkah-langkah antisipasi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga mampu bersaing. Sehingga salah satu langkah tepat yang harus diambil oleh lembaga pendidikan Islam adalah dengan mengembangkan kurikulum yang berorientasi kepada perbaikan dan penyesuaian terutama dalam meningkatkan kualitas dan keahlian lulusan lembaga pendidikan Islam agar dapat langsung dipakai di pasar kerja.

Ada tiga persoalan yang dihadapi oleh lulusan lembaga pendidikan Islam, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA). Pertama, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk siap pakai di dunia kerja. Dalam hal ini lembaga pendidikan Islam dipandang masih belum mampu secara merata memproduksi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan daya saing tinggi. Dampak dari kekurangan ini adalah, posisi-posisi pekerjaan *entry-level* dan *middle-level* masih di dominasi oleh pekerja asing maupun tamatan lembaga pendidikan umum.

Selain itu, lemahnya kemampuan ini, ternyata dibarengi dengan kekurangan terhadap penguasaan skill manajerial dan wawasan (*leadership skills* dan *global exposure*). Padahal kemampuan tersebut sangat dibutuhkan bagi perusahaan ataupun dunia kerja untuk dapat unggul dalam persaingan. Tanpa kemampuan manajerial yang baik, maka pengelolaan dan tujuan organisasi tidak dapat tercapai dengan baik pula. Hal ini bisa saja diatasi dengan membentuk kurikulum terpadu antar lembaga pendidikan Islam se-Asia Tenggara serta pengembangan kompetensi lulusan lembaga pendidikan Islam se-Asia Tenggara yang berorientasi kepada pemenuhan keperluan dan peluang dunia kerja tanpa meninggalkan esensi utama dari lembaga pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai Islam kepada para alumninya.

Kedua, kecakapan bahasa lulusan lembaga pendidikan Islam yang belum tergalai secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya dominasi keberadaan lulusan lembaga pendidikan Islam yang berperan aktif dalam dunia kerja internasional khususnya di ASEAN, serta masih rendahnya lulusan lembaga pendidikan Islam yang mampu secara aktif mempraktikkan kemampuan berbahasanya. Padahal penguasaan jaringan (*networking*), penguasaan inovasi dan penguasaan teknologi perlu dibarengi dengan kecakapan di bidang bahasa sehingga memungkinkan terbukanya transfer *knowlodge* dan relasi hubungan kerja yang menguntungkan. Hal ini juga bisa diatasi dengan memberikan kemampuan penguasaan bahasa internasional yang dimulai dari bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, maupun di lembaga akademisi. Penguasaan bahasa akan sangat memudahkan penyampaian informasi serta membantu penggunaannya dalam bertransaksi antar lintas Negara yang berbeda.

Ketiga, perpindahan arus teknologi dan budaya secara global. Adanya aliran bebas perpindahan teknologi dan budaya menyebabkan kearifan lokal yang dimiliki oleh generasi muda khususnya para pemuda Islam dapat tergerus arus globalisasi yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Perubahan ini akan berdampak pada krisis identitas budaya bangsa yang pada akhirnya melahirkan budaya baru serta menghilangkan budaya lama. Ini juga menjadi tugas dari lembaga pendidikan

Islam dengan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berorientasi kepada kesiapan menghadapi MEA, akan tetapi juga menghasilkan generasi yang bertaqwa kepada Allah SWT.³⁴

5. Tinjauan Secara Manajemen Negara

Kurikulum pendidikan Islam dan kaitannya dengan manajemen Negara dapat kita amati dari munculnya Undang-Undang no. 22 tahun 1999 yang secara jelas mengatur kewenangan pemerintah daerah dengan memasukkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomikan sehingga kebijakan-kebijakan tentang *school knowledge, school and learning time, assessment, budgeting* dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tanggung jawab sekolah yang harus dirancang serta diimplementasikan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Adapun terkait dengan pengembangan dan perubahan kurikulum walaupun masih terkesan bersifat sentralisasi akan tetapi lembaga pendidikan di suatu daerah bisa merekonstruksi kembali kurikulum tersebut dengan memasukkan nilai-nilai maupun kearifan lokal yang ingin ditanamkan kepada siswa-siswinya dengan catatan tetap harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah daerah.³⁵

Penutup

Keberadaan kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan sangat berperan penting, tidak hanya menjadi penjabaran dari visi dan misi sekolah akan tetapi menjadi panduan bagi sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya di sekolah.

Sebagai sebuah bagian dari sistem pendidikan, kurikulum juga harus selalu diperbaharui dan dikembangkan secara terencana dengan mempertimbangkan segala aspek di dalamnya. Perubahan dan perkembangan kurikulum tidak boleh dimaknai hanya dengan perpindahan materi ataupun penambahan teori baru semata, akan tetapi dalam pelaksanaannya (perubahan dan perkembangan kurikulum) harus mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, politis, ekonomi dan manajemen Negara. Sehingga perubahan dan perkembangan kurikulum khususnya kurikulum pendidikan Islam dapat lebih terarah dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Muzaiyyin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Asfiati. *Pendekatan Humanis dalam Pengembangan Kurikulum*. Medan: Perdana Publishing, 2016.

³⁴Muhammad Tisna Nugraha, "Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", at-Turats Vol. 10, no. 1 (2016): h. 14-20.

³⁵Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah* (Depok: Kencana, 2017), h. 59.

Bahri, Syamsul. "Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya" *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vo. XI, no. 1, 2011.

Crow and Crow. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, terjm. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.

Didiyanto. "Paradigma Pengembangan Kurikulum PAI di Lembaga Pendidikan" *Jurnal Pendidikan Agama Islam Edureligia* Vol. 1, no. 2, 2017.

Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Hasan, Moch. Sya'roni. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terpadu di Sekolah", *Al-Ibrah* Vol. 2, no. 1, 2017.

Hasbullah. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2007.

Irsad, Muhammad. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah", *Jurnal Iqra* Vol. 2, no. 1, 2016.

Kaimuddin. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi". *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 8, no. 1, 2015.

Langgulung, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992.

Machali, Imam. "Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045". *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1111, no. 1, 2014.

Majid, Abdul dan Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Maunah, Binti. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

Miel, Alie. *Changing The Curriculum a school Proses*. New York: D Appleton Century Company, 1946.

Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajagrafindo, 2004.

Munawwir, A. Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 1. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Musawir. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Tiattang Kabupaten Bone*. Tesis tidak diterbitkan, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Husin

PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN..

Nata, Abudin. *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. III. Jakarta: Kencana, 2016.

Nugraha, Muhammad Tisna. "Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". *at-Turats* Vol. 10, no. 1, 2016.

Romine St. *Building The High School Curriculum*. New York: The Ronald Press Company, 1954.

Rosyada, Dede. *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana, 2017.

S. Nasution. *Pengembangan Kurikulum*, cet. Ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Sabda, Syaifuddin. *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Salamah. *Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Saylor, and Alexander. *Curriculum Planing for Better Teaching and Learning*. New York: Holt:Rinchat, 1960.

Syaibani, Omar Muhammad al-Toumy. *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosdakarya, 2008.

ADDABANA Jurnal Pendidikan Agama Islam
E-ISSN 2620-6129
Vol. 1 No. 2, Agustus-Januari 2018, 71-82